



► PILKADA 2024

# Sisa Dana Pengawasan Rp3,3 Miliar Dikembalikan

**WATES-Bawaslu  
Kulonprogo**

**mengembalikan dana sisa  
pengawasan ke Pemkab.  
Pengembalian dana itu  
sebesar Rp3,3 miliar  
dari total dana hibah  
sebesar Rp12,1 miliar.**

*Triyo Handoko  
triyo@harianjogja.com*

Pengembalian dana sisa pengawasan Pilkada Kulonprogo oleh Bawaslu itu dilakukan pekan lalu. Dana sebesar Rp3,3 miliar itu diserahkan Pemkab saat pelaporan akhir penggunaan dana hibah.

Ketua Bawaslu Kulonprogo, Marwanto, menjelaskan sisa Rp3,3 miliar itu merupakan hasil penghematan anggaran yang dilakukan lembaganya. Penghematan itu tidak berdampak pada kualitas penyelenggaraan pilkada yang sukses dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan tidak adanya

► Dana sebesar Rp3,3 miliar itu diserahkan ke Pemkab saat pelaporan akhir penggunaan dana hibah.

► Sesuai regulasi, paling lambat tiga bulan setelah tahapan Pilkada 2024 berakhir, sisa anggaran harus dilaporkan.

gugatan ataupun sengketa pilkada di Bumi Binangun.

Marwanto menjelaskan pengembalian dana hibah ini sesuai regulasi yang ada. "Sesuai regulasi, paling lambat tiga bulan setelah tahapan Pilkada 2024 berakhir, jika ada sisa anggaran maka kami harus melaporkan penggunaannya," katanya.

Sementara, tahapan Pilkada Kulonprogo rampung pada 10 Januari 2025 saat KPU menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih. "Sisa anggaran sebesar Rp3,3 miliar tersebut sudah ditransfer ke rekening milik Pemkab pada 10 Maret 2025," ujarnya.

Meski sudah mengembalikan

dana hibah pilkada, Marwanto juga masih mempelajari untuk pengajuan hibah untuk pilkada non-tahapan. "Bawaslu di kabupaten/kota lain mengajukan permohonan anggaran dana hibah non-tahapan, tapi kami masih mempelajari lebih lanjut terkait dengan pengajuan dan permohonan anggaran hibah jenis ini," katanya.

Penggunaan hibah non-tahapan, menurut Marwanto, diperlukan terutama untuk pemeliharaan Kantor Bawaslu Kulonprogo. "Pemeliharaan kantor saat tahapan kemarin dianggarkan nol rupiah karena memang terbatas, padahal kantor kami masih aset Pemkab. Jadi, kami masih menalami dan memfinalkan rencana pengajuan dana hibah non-tahapan," katanya.